

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA NAPA KECAMATAN MAWASANGKA, KABUPATEN
BUTON TENGAH**

Oleh: I Rawati¹, Siti Nadia Gunawan²

^{1,2}Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Abstract

This study aims to describe the Government's Role in Empowering the Family Welfare Empowerment Team (TP-PKK) in Napa Village, Mawasangka District, Buton Tengah Regency. This research uses a descriptive qualitative method. Types and sources of data used are primary data and secondary data. With data collection techniques, namely, interviews, observation and documentation. This study was conducted with a total of 9 informants. The data analysis technique used is data collection, presentation, and conclusion drawing. The data validity technique used is data credibility and data certainty. The results showed that the role of the Napa Village government in TP-PKK had not run optimally, as seen from the government facilitators and catalysts providing facilities for TP-PKK in the clothing program in the form of offering goods and services such as giving bamboo for making fences in every house, in the food program in the form of goods, namely the provision of sewing machine tools to meet family needs to increase family income, found in the cooperative life development program in the form of funds where coaching and development of efforts to increase family income (UP2K) in all PKK groups, found in education and skills programs in the form of funds but because inadequate funds and tools so that people in developing innovation and creativity cannot be fully implemented. In conclusion, the role of the village government as a facilitator and catalyst has not run optimally. Likewise, cooperation between social institutions and third parties has not run optimally due to inadequate facilities, so providing guidance and supervision is still not optimal.

Key Words : Role Government, Empowering Family Welfare, Napa Village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Napa Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dengan Teknik penumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. penelitian ini dilakukan dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Data collection, penyajian data dan penarik kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah Kredibilitas data dan kepastian Data. Hasil penelitian menunjukkan Peran pemerintah Desa Napa pada TP-PKK belum berjalan optimal dilihat dari fasilitator dan katalisator pemerintah memberikan fasilitas terhadap TP-PKK terdapat pada program sandang berupa pemberian barang dan jasa seperti pemberian bambu untuk pembuatan pagar di setiap rumah, terdapat pada program pangan berupa barang yaitu pemberian alat mesin menjahit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga, terdapat pada program pengembangan kehidupan berkoperasi berupa dana dimana pembinaan dan pengembangan upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) di semua kelompok PKK, terdapat pada program pendidikan dan keterampilan berupa dana namun karna dana dan alat yang kurang memadai sehingga masyarakat dalam mengembangkan inovasi dan kreativitasnya belum bisa

terlaksana sepenuhnya. Sebagai kesimpulan, Peran Pemerintah desa sebagai fasilitator dan katalisator belum berjalan optimal. Demikian pula dengan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga belum berjalan optimal karena fasilitas yang kurang memadai sehingga dalam memberikan pembinaan dan pengawasan masih belum maksimal.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Desa Napa

PENDAHULUAN

Keputusan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi perempuan di bawah departemen dalam federasi mengakibatkan lahirnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Nikma, 2019), yaitu organisasi yang mewadahi perempuan yang tidak berada di bawah departemen. Organisasi ini bermula dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya melibatkan partisipasi dan merupakan program pendidikan perempuan. Selanjutnya organisasi ini berubah menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang berupaya tidak hanya mendidik perempuan, melainkan membina dan membangun keluarga di bidang mental spiritual dan fisik material serta peningkatan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Bergulirnya reformasi dan disyahkannya GBHN 1999 oleh MPR serta adanya paradigma baru pembangunan dan semangat otonomi daerah, maka kepanjangan PKK berubah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yaitu sebuah organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah (Nurhayati 2018). Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian.

Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah (Andi dkk, 2019). PKK menjadi gerakan untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dengan mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat. PKK juga harus menembus pemahaman agama yang kurang tepat, tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program KB kepada masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah, mereka membantu korban kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. PKK concern dalam membela kaum miskin yang kelaparan dengan cara membantu ekonomi kaum perempuan. Program kerja PKK berorientasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. Dan lebih dari itu, PKK mempunyai andil besar. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 5 berbunyi : “Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”.

Sebagai wadah pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) harus dapat menjalankan perannya dengan baik dalam membina ibu-ibu rumah tangga yang direkrut untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan

baik peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak.(Pakudek,dkk.2018). Sama seperti desa lain yang mengalami pertumbuhan cepat yang mengupayakan pemberdayaan bagi masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemerintahan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah pada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Miftahuljannah dkk, 2022). Hal ini lebih banyak dititik beratkan di Desa yang bekerjasama dengan Pengurus PKK di setiap Desa. Menurut Peraturan Desa Napa BAB VII Pembinaan tahun 2020 pasal 28 Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi: a.Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa b.Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif c.Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa d.Memfasilitasi kerjasama lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga.

Desa Napa merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Desa Napa menjadi salah satu desa yang berusaha menggerakkan partisipasi masyarakatnya terkhusus kaum perempuan dalam melibatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Desa Napa terdiri dari beberapa Dusun yaitu: Dusun Mapalenda, Dusun Baru, Dusun Wamuntia, Dusun Kaubula. Dengan keseluruhan jumlah data penduduk 1567 dengan Kepala Keluarga (KK) 416 jiwa dan laki-laki berjumlah 878 dan perempuan berjumlah 688 jiwa serta anggota PKK berjumlah 52 orang serta memiliki empat pokja yaitu: pokja I terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sebanyak empat orang, pokja II terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sebanyak empat orang, pokja III terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sebanyak tiga orang, pokja IV terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sebanyak tiga orang. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) diberikan dana sebesar Rp 8.000.000 setiap tahun. Dana tersebut diberikan langsung dari Pemerintah baik sumber Dana Kabupaten Provinsi atau pusat dana yang di berikan langsung digunakan untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan diantaranya: pembuatan struktur organisasi (PKK) pembelian alat tulis kantor (ATK) pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) pembelian kostum pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) serta gaji pengurus (PKK) atau yang biasa disebut kader.

Berdasarkan hasil observasi di atas mengenai Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ada di Desa Napa ternyata masih terdapat program-program dari Tim Penggerak PKK belum berjalan dengan baik seperti program Pendidikan dan Keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, sandang dan pangan dikarenakan masih terdapat fasilitas yang kurang memadai salahsatunya penyediaan alat-alat seperti penyediaan mesin jahit, perlengkapan kerajinan tangan serta pengadaan pembinaan pelatihan usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan lain-lain.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Napa Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dalam suatu penelitian, yakni dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan

menggambarkan kenyataan yang didapat dilapangan. Data yang telah peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam kemudian data tersebut perlu dibaca kembali untuk melihat keberadaan hal-hal yang masih meragukan dari jawaban informan.

Keberadaan konsep dalam penelitian sangat penting karena erat kaitanya dengan fenomena yang diteliti. Mengingat sifat fenomena itu luas, maka keberadaanya harus dibatasi sedemikian rupa sehingga tampak jelas oleh pengamat atau peneliti. Sehubungan itu, maka penggunaan konsep dapat maka penggunaan konsep dapat di lakukan dengan membahasnya dari yang sifatnya abstrak ke dalam bentuk yang secara operasional mudah di pahami sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai akan menjadi sumber utama dalam penelitian.

Sumber data ini kemudian dicatat dan direkam oleh peneliti untuk mempermudah dalam proses penyusunan hasil temuan. Kemudian yang akan dilakukan selanjutnya yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan studi pustaka kemudian dipaparkan dalam bentuk tertulis berupa kata-kata berdasarkan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Fokus utama penelitian ini adalah peran pemerintah dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Oleh karena itu dalam pembahasan penelitian ini penulis mencoba membandingkan, menyadingkan dan mentandingkan antara hasil penelitian ini dengan hasil penelitian lain, hasil penelitian dengan teori-teori, hasil penelitian dengan konsep-konsep, bahkan antara teori dengan teori maupun konsep dengan konsep.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peran lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan suatu proses. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur seseorang atau kelompok. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto 1989: 234).

Menurut Peraturan Desa Napa BAB VII Pembinaan tahun 2020 pasal 28 Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. a.Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. b.Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
- c. c.Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- d. d.Memfasilitasi kerjasama lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya di singkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Peran pemerintah Desa sangat penting bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program PKK ini sudah

dilaksanakan guna memberdayakan perempuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Napa, karena adanya peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan program PKK. Ini semua bisa berjalan dikarenakan ada campur tangan pemerintah yang mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi dalam Pelaksanaan Program PKK dengan kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Tetapi, bukan hanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi adanya proses masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya.

Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program PKK ini sudah dilaksanakan guna memberdayakan perempuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas khususnya perempuan yang berada di Desa Napa. Terlaksananya program ini tidak lepas dari dukungan dari pemerintah desa Napa.

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah dalam hal ini Gede Diva dalam (Rahmadayanti S: 2021) berdasarkan indikator Gede Diva dalam (Rahmadayanti S: 2021) yaitu: Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Peran Pemerintah sebagai Regulator, Peran Pemerintah sebagai katalisator.

1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi Tim Penggerak PKK agar tujuan yang akan dicapai berjalan dengan baik. Fasilitas yang dapat disediakan dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan, atau barang maupun jasa, melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah harus menyediakan fasilitas dan jalan yang ditempuh terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) agar tujuan yang di capai berjalan dengan baik. Fasilitator adalah pemerintah harus menyediakan fasilitas dan jalan yang ditempuh terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) agar tujuan yang di capai berjalan dengan baik. Fasilitas yang dapat disediakan dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan, atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peran Pemerintah Desa Napa dalam memfasilitasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga belum berjalan optimal hal ini ditandai dengan Peran pemerintah Desa Napa masih kurang dalam memfasilitasi kegiatan program Tim Penggerak PKK seperti Fasilitas yang pernah di berikan oleh pemerintah Desa Napa terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yaitu terdapat pada program sandang salah satunya fasilitas berupa pemberian barang dan jasa seperti pemberian bambu untuk pembuatan pagar di setiap rumah agar lahan pekarangan yang ada disekitar rumah masyarakat yang berisi berbagai macam tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan dapat terhindar dari hewan pemakan tumbuhan namun karna fasilitas yang kurang memadai sehingga sebagian masyarakat masih kurang mendapatkan fasilitas tersebut, Fasilitas yang di berikan oleh pemerintah Desa Napa terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK yaitu terdapat pada program pangan salasatunya fasilitas berupa barang yaitu pemberian alat mesin menjahit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga namun alat yang diberikan untuk menjahit masih kurang memadai sehingga masyarakat khusus kaum perempuan dalam mengadakan pelatihan tersebut belum berjalan optimal, Fasilitas yang pernah di berikan oleh pemerintah Desa Napa terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yaitu terdapat pada program pengembangan kehidupan berkoperasi salasatunya fasilitas berupa dana dimana pembinaan dan pengembangan upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) di semua kelompok PKK sehingga manfaatnya semakin berarti bagi usaha masyarakat khusus kaum perempuan namun keterbatasan modal sehingga sebagian masyarakat masih kurang terampil dalam memilih usaha apa yang mampu dinikmati khalayak ramai, Fasilitas yang pernah di berikan oleh pemerintah Desa Napa terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK yaitu

terdapat pada program pendidikan dan keterampilan salasatunya fasilitas berupa dana dimana dana tersebut untuk pengadaan pelatihan keterampilan seperti kursus membuat bunga dari bahan bekas namun karna dana dan alat yang kurang memadai sehingga Tim Penggerak PKK dalam menjalankan kegiatannya belum berjalan optimal.

Fasilitas yang pernah di berikan oleh pemerintah Desa Napa terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yaitu terdapat pada program pengembangan kehidupan berkoperasi salasatunya fasilitas berupa dana dimana pembinaan dan pengembangan upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) di semua kelompok PKK sehingga manfaatnya semakin berarti bagi usaha masyarakat khusus kaum perempuan namun keterbatasan modal sehingga sebagian masyarakat masih kurang terampil dalam memilih usaha apa yang mampu dinikmati khalayak ramai, Fasilitas yang perna di berikan oleh pemerintah Desa Napa terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK yaitu terdapat pada program pendidikan dan keterampilan salasatunya fasilitas berupa dana dimana dana tersebut untuk pengadaan pelatihan keterampilan seperti kursus membuat bunga dari bahan bekas namun karna dana yang kurang memadai sehingga masyarakat dalam mengembangkan inovasi dan kreativitasnya belum bisa terlaksana sepenuhnya.

2. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan untuk dapat menjalankan peranya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses pengembangan diri terhadap pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Napa sebagai Katalisator belum berjalan optimal hal ini ditandai Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan dapat dikatakan bahwa respon pemerintah Desa Napa dalam mempercepat kelembagaan program PKK yaitu dengan cara memberikan fasilitas yang berupa barang salasatunya dana dan alat, di mana dana tersebut dari pemerintah untuk Tim Penggerak PKK agar dengan adanya dana program kegiatan PKK bisa berjalan dengan baik namun dana yang diberikan masih belum memadai dalam menjalankan kegiatan tim penggerak PKK, dan alat di mana alat tersebut seperti alat mesin jahit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga agar dapat membantu Tim Penggerak PKK Dalam menjalankan kegiatan program PKK namun bahan dan alat tersebut masih belum memadai dalam menjalankan kegiatan tim penggerak PKK, Tim penggerak PKK juga masih memfokuskan atau masih mengusahakan bagaimana caranya agar program-program yang bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga seperti halnya program Pendidikan dan Keterampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, sandang dan pangan agar bisa berjalan.

3. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan untuk dapat menjalankan peranya sebagai katalisasi, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses pengembangan diri terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peran disini adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mengembangkan keahliannya. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah sebagai Regulator PKK belum berjalan optimal maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan yang di berikan oleh pemerintah terhadap tim penggerak PKK agar dapat mempermudah mengembangkan keahliannya tim penggerak PKK yaitu: Menurut Peraturan Desa Napa BAB VII Pembinaan tahun 2020 pasal 28 Pemerintah Desa memberikan pembinaan dan pengawasan meliputi: a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa d. Memfasilitasi kerjasama lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga. Namun kebijakan tersebut masih belum berjalan optimal karena fasilitas

yang kurang memadai sehingga dalam memberikan pembinaan dan pengawasan masih belum maksimal.

PENUTUP

Peran Pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai masih kurang dalam memfasilitasi kegiatan program Tim Penggerak PKK seperti Fasilitas yang pernah di berikan oleh pemerintah Desa Napa terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yaitu pada program sandang, pangan, program pengembangan kehidupan berkoperasi, program pendidikan dan keterampilan, serta dana yang diberikan masih belum memadai untuk menjalankan program atau kegiatan tim penggerak PKK. Demikian halnya dengan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga belum berjalan optimal.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang bisa diberikan adalah, pemerintah desa setempat seharusnya memperhatikan pentingnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) khususnya dalam hal fasilitas dan peningkatan pelatihan atau pembinaan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulayani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Alfan Ariwibowo. 2019. *Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembentukan solidaritas perempuan di Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, Desa Sidomulyo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*. Skripsi.
- Ali Munsir 2013. *Peran Pendamping Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulu Wawo Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara*. Skripsi.
- Andi Rustandi, R. Bunga Febriani, Bambang Ruby Sugiarto, 2019. Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Melalui Pelatihan English For Business dan English For Tourism di Desa Sukaresik Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*. Vol. 1, No. 1, 32-35
- Anwas, M Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- A.A.Anwar Prabu Mangkunegara. 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Cetakan Ke Tujuh PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Alfitri. 2011. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bardhan Pranab, Dilip Mookherjee. 2006. *Decentralization and Local Governance in Developing countries A Comparative Perspective*. London: The Mit Press Combridge.
- Edi Suharto, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. PT.Refika
- Aditama Hariyana. 2012. *Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan)*. SKRIPSI. DEPOK. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poltik Program Studi Ilmu Administrasi Negara DEPOK.
- HAW.Widjaja (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

- Harahap, Jam'ah. 2019. *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Wanita di Desa Simatahari Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.*
- Ima Wati, dkk.(Ed). 2015. *Peranan PKK dalam meningkatkan pemberdayaan wanita kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung.*
- Nikma Wahyuni Hanis, Atika marzaman. 2019. Peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* Vol 8. No. 2
- Nurhayati, 2018. Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender. *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.2: 153 – 162
- Miftahuljannah, Isabella, Amaliatulwalidain. 2022. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). *Jurnal Wedana*. Vol. VIII. No. 2
- Moleong, Lexy J. (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peraturan Desa Napa Nomor 03 Tahun 2020.
- Rahmadayanti S. 2021 *Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton*. Universitas Bosowa Makassar.
- Rita Pranawati dan Irfan Abubakar, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. Ke-1, 2009)*, h.120.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunarno Siswanto.2006 *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.7-8.
- Supriyadi. 2016. *Pemberdayaan Kader PKK melalui Kegiatan PKK di Desa Banyusidi Kecamatan Magelang*. SKRIPSI. Yogyakarta. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Shah, Anwar. 2006. *Local Governance in Developing Countries Public Sector Governance and Accountability Series*. Washington, D.C.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Alfabata.
- Supriadin. 2019. *Peran Pemerintah Desa pada Peningkatan Proses Pemberdayaan Perempuan (PKK) Menuju*

Good Governance. Desa Golong

Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kkuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: alfabeta.

Sugiono, 2003. *Petode Penelitian Administrasi*. Bandung :Alfabeta.

Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.